

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

ANISA LITFIA WACHIDAH
B 300 140 238

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN – SI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015**

PUBLIKASI ILMIAH

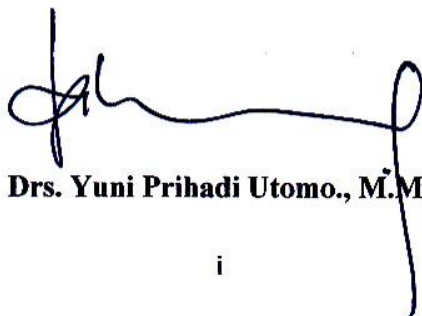
Oleh:

ANISA LUTFIA WACHIDAH

B300140238

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Yuni Prihadi Utomo., M.M.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2015**

Oleh:

ANISA LUTFIA WACHIDAH

B300140238

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Sabtu, 04 Agustus 2018

Dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- 1. Drs. Yuni Prihadi Utomo., M.M.**
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Siti Fatimah Nurhayati, S.E, M.Si.**
(Anggota 1 Dewan Penguji)
- 3. Drs. Triyono., MSi**
(Anggota 2 Dewan Penguji)



**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Agustus 2018

Penulis



Anisa Lutfia Wachidah

B300140238

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015

Abstraks

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah analisis penelitian ini menjadi dua tahap. Pertama menghitung Rasio Keuangan (Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan) dan selanjutnya dibandingkan dengan Uji Beda Dua Mean Non Parametrik Kolmogorov – Smirnov Dua Sampel. Penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Jawa Tengah lebih mandiri dari pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu perbandingan Uji Beda Dua Mean Non Parametrik Kolmogorov – Smirnov Dua Sampel, tidak ada perbedaan pada Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Uji Beda Dua Mean Non Parametrik Kolmogorov – Smirnov Dua Sampel.

Abstract

The purpose of this study is to determine the Financial Performance of Central Java Province and Yogyakarta Special Region. The analysis of this research are two steps. First the Financial Ratio e.g. Ratio of Independence, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Income Growth Ratio are calculate, then the ratio between two region are compared using Non Parametric Kolmogorov – Smirnov of Two Samples Mean Test. The data of this research obtained from Central Bureau of Statistics (BPS) Central Java Provincial Government and Special Region of Yogyakarta. The result show that independence ratio of Central Jawa were significantly higher then Special Region of Yogyakarta. Meanwhile the Kolmogorov – Smirnov of Two Sample Mean Test did not show any mean difference between the two region in term of Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Income Growth Ratio.

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Income Growth Ratio, Two Differential Test Non-Parametric Kolmogorov - Smirnov Two Samples.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan, perekonomian, pembangunan daerah, dan memberikan

pelayanan kepada seluruh masyarakat agar dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab kepada pengelolaan keuangan agar dapat tercipta sistem pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012).

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Paat, 2013). Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dapat dituangkan dalam satu anggaran pemerintah daerah (Retno dan Ruserlistyanti, 2013).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Muliastini, dkk 2013).

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012).

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya (Hony, 2013). Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Berikut peneliti sajikan kinerja keuangan provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2010

Rasio	Provinsi Jawa Tengah	Daerah Istimewa Yogyakarta
Kemandirian	264%	118%
Efektivitas	123%	119%
Efisiensi	91%	99%
Pertumbuhan	16%	7%

Sumber: Data BPS Diolah, 2018

Dari Tabel 1. terlihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan masing-masing rasio di Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rasio kemandirian Jawa Tengah sebesar 264%, 164% lebih tinggi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pada Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Pertumbuhan Pendapatan pada kedua wilayah tidak jauh berbeda.

2. METODE

2.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu gabungan dari data *time series* rentang waktu 2010-2015 dan data *cross section* yang meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (meliputi 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah dan 5 kabupaten / kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghasilkan 240 observasi). Data diperoleh dari instansi atau pusat data secara online seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

2.2 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua alat analisis. Pertama akan dihitung Rasio Keuangan yang meliputi rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya rasio-rasio pada

kedua wilayah tersebut akan dibandingkan dengan menggunakan Uji Beda Dua Mean yakni Uji Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov Dua Sampel.

Variabel dependen dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan variabel independen terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015.

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel di kedua daerah sebagai berikut :

Tabel 2. Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Rasio Kemandirian Jawa Tengah	Rasio Kemandirian DIY
2010	264%	118%
2011	285%	120%
2012	286%	112%
2013	333%	127%
2014	390%	144%
2015	485%	156%
Rata-rata	340.5%	129.5%

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018

Tabel 3. Rasio Efektivitas Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Rasio Efektivitas Jawa Tengah	Rasio Efektivitas DIY
2010	123%	119%
2011	108%	124%
2012	114%	125%
2013	124%	120%
2014	119%	119%
2015	93%	110%
Rata-rata	113.5%	119.5%

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018

Tabel 4. Rasio Efisiensi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Tahun	Rasio Efisiensi Jawa Tengah	Rasio Efisiensi DIY
2010	91%	99%
2011	100%	97%
2012	100%	95%
2013	100%	97%
2014	100%	95%
2015	100%	103%
Rata-rata	98%	97%

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018

Tabel 5. Rasio Perumbuhan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta

Tahun	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Jawa Tengah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan DIY
2010	16%	7%
2011	14%	17%
2012	55%	35%
2013	14%	19%
2014	14%	22%
2015	11%	8%
Rata-rata	20.66%	18%

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018

Tabel 6. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua
Sampel

		Rasio Keuangan			
		RK	REFT	REF	RP
Most Extreme	Absolute	1,000	,333	,667	,500
Differences	Positive	,000	,333	,167	,500
	Negative	-1,000	,000	-,667	-,333
Kolmogorov-Smirnov Z		1,732	,577	1,155	,866
Asymp. Sig. (2-tailed)		,005	,893	,139	,441

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dan DIY diolah, 2018

3.1 Menghitung Rasio Keuangan

3.1.1 Perbandingan Rasio Kemandirian

Dari sisi rata-rata Rasio Kemandirian di kedua wilayah tersebut, yakni dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 340.5% dan di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta sebesar 129.5%, maka Provinsi Jawa Tengah mempunyai rata-rata lebih tinggi dari pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat dikatakan lebih mandiri dalam mengelola kegiatan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

3.1.2 Perbandingan Rasio Efektivitas

Dari sisi rata-rata Rasio Efektivitas di kedua wilayah tersebut, yakni dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 113.5% dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 119.5% ,maka Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata yang tidak jauh berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1.3 Perbandingan Rasio Efisiensi

Dari sisi rata-rata Rasio Efisiensi di kedua wilayah tersebut, yakni dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 98% dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 97%, maka Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata yang tidak jauh berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut kurang efisien dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan daerah.

3.1.4 Perbandingan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Dari sisi rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan di kedua wilayah tersebut, yakni dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 20.66% dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 18%,maka Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata yang tidak jauh berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut kurang dapat meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.

Berdasarkan Rasio Kemandirian di kedua wilayah, memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah lebih mandiri dalam mengelola kegiatan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rasio Efektivitas di kedua wilayah, baik di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai tingkat efektivitas yang baik. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel tidak terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah pada kedua wilayah tersebut sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Rasio Efisiensi di kedua wilayah, baik di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat mencapai tingkat efisiensi yang baik. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel tidak terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah pada kedua wilayah kurang efisien dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan daerah.

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan di kedua wilayah, baik di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan yang baik. Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel terdapat perbedaan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut kurang dapat meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Bastian,indra. 2006. *Akutansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Andi. Erlangga. Yogyakarta
- Dwijayanti, R. dan Rusherlistyanti. 2013. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.1, Edisi Maret 2013, Hal. 43-66.
- Freeman, R. E., (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman Publishing
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*: Edisi kedua. UPP STIM YKPN.
- Mankiw, gregory (2001). *Prinsciple Of Economics, Second Edition*. Harcount College.
- Mardiasmo. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Martini, Kadek. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali*. ISSN 2302-8556. *Jurnal Akuntansi*.
- Mohammad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Muliastini, P.N dan Yadnyana, I.K. 2013. “*Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Sarbagita Tahun Anggaran 2007–2011*”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3.1 (2013): Hal. 92-108.
- Paat, Selly. 2013. “*Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD Antara Pemerintah Kota Tomohon Dengan Pemerintah Kota Manado*”. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, Edisi September 2013, Hal. 851-862.
- Putri Mega Ayuningtyas “*Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Ramadhani Febby Randria. 2016 “*Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015*”. Vol.14 No.01 Juni
- Reni Susiati, Syarifah Ratih Kartika Sari Yogy Budi Yudawijaya. 2017. “*Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah*”. Volume 6 Nomor 1; ISSN : 230-4747

- Retno Dwijayanti Rusherlistyanti. 2013. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*”. Volume 12. Nomor 01.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)”. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Suliyanto. 2014. *Statistika Nonparametrik: Dalam Statistik Penelitian*. Andi. Yogyakarta
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Sutrisno. 1982. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Andi. Yogyakarta
- Tamboto Laedy, Jenny Morasa, Lidia Mawikere. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara*. ISSN 2303-1174.
- Tambuwun, Evran Lexy, dkk. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado*. ISSN 2303-1174. Vol.2 No.4 Desember
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2004.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Utomo, Yuni P. 2018. *Uji Non Parametrik Beda Mean Kolmogrov-Sumirnov Dua Sampel Independen*. Surakarta.
- Wertianti Gede dan Dwirandra. 2013. “Pertumbuhan ekonomi pada belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi”: Studi Kasus Bali. ISSN:2302-8556 *Jurnal Akuntansi* Vol. 4 NO. 3: 567-584
- Williantara dan I Gusti Ayu, 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. ISSN 2301-8556. *Jurnal Akuntansi*
- Wonda Welio. 2016 “Analysis Of Financial Performance During Local Government District Autonomy Nabire Papua”. ISSN 2303-1174. Vol.4 No.3 September